

Pengaruh Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi

Chintya Salsabiela¹

Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author : Chintyasalsa46@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of this research aims to determine the effect of the effectiveness of PBB, BPHTB, and Groundwater Tax on the effectiveness of local revenue in Bekasi Regency. This research uses independent variables, namely PBB, BPHTB, and Groundwater Tax, while the dependent variable is the effectiveness of local revenue. The sample for this research is the Regional Budget and Expenditure Realization Report (LRA) from 2019 to 2023 obtained from the Bekasi Regency Regional Financial and Asset Management Agency. The sampling technique was carried out using the Purposive Sampling method. The research method applied is multiple linear regression. The results of this research indicate that the effectiveness of PBB and BPHTB has a significant effect on the effectiveness of PAD while the effectiveness of groundwater tax has no effect on the effectiveness of PAD. Overall, the effectiveness of PBB, BPHTB, and groundwater tax has an has an appear to have an influence of 71.9% on the effectiveness of PAD while the remaining 28.1% is explained by other factors outside the equation model used.

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah terhadap Efektivitas PAD Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan variabel independen efektivitas, yaitu PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah, sedangkan variabel dependennya adalah efektivitas pendapatan asli daerah. Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) pada tahun 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Metode penelitian yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PBB dan BPHTB berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas PAD sementara efektivitas pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap efektivitas PAD. Secara keseluruhan efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah mempunyai pengaruh sebesar 71,9% terhadap efektivitas PAD sedangkan sisanya sebesar 28,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model persamaan yang digunakan.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara dengan pendapatan terbesar yang berasal dari pajak, hal tersebut berasal dari pajak pusat maupun pajak daerah (Reza et al., 2023). Pada tahun 2019, Kepala Bidang Pengendalian dan pembukuan Bapenda Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa kabupaten Bekasi mengalami penurunan PAD, hal tersebut terjadi dikarenakan sektor retribusi

OPD melakukan penurunan target pendapatannya. Pada tahun 2020 Indonesia menghadapi masa kritis, Indonesia memasuki masa pandemi virus korona yang memberikan dampak luar biasa pada negara, virus korona juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PAD (Manawan et al., 2023). Dengan adanya virus korona pada tahun 2020, PAD Kab. Bekasi mengalami penurunan. Pada 30 April 2020 pimpinan PBB dan BPHTB Kab. Bekasi, Eko Supraya mengatakan bahwa di fase tersebut memberikan dampak penurunan pada PAD. Setelah pandemi pada tahun 2020 berhasil dilewati atau perekonomian kembali pulih, pemerintah mulai mengoptimalkan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanapi untuk mencapai target tahun 2021, pihaknya melakukan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat serta pihaknya juga mengajak kepada seluruh masyarakat kabupaten Bekasi untuk taat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu karena pajak daerah menjadi salah satu sumber yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program kerjanya dan untuk terus membangun daerahnya menjadi lebih baik. Tahun 2022 sampai 2023 pemerintah terus melakukan inovasi dan evaluasi kinerja agar tercapainya target untuk peningkatan pendapatan. Pemerintah juga melakukan perkembangan melalui aplikasi "SAPA" yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran dapat dilakukan secara online serta berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam transparansi pemungutan pajak.

Dengan adanya reformasi mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan undang-undang, pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan segala perkembangannya bertujuan untuk melakukan pembangunan daerahnya agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil (Satya & Dewi, 2010). Pajak dapat menjadi potensial untuk lebih digali tergantung dari perekonomian, pertumbuhan serta perkembangan suatu negara (Siahaan, 2016). Pajak mempunyai peran yang penting untuk pemerintahan di negara Indonesia, penting baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan aktivitas daerah ataupun kegiatan pemerintah, serta digunakan dalam pembiayaan rumah tangga negara (Putri & Taun, 2023).

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan agar dapat membangun serta memajukan daerahnya (Siregar, 2023). Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menjalankan rencana kerjanya dan PAD merupakan pendapatan pendapatan yang dapat diperoleh dengan memungut pajaknya berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian terbit UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB dilimpahkan menjadi pajak daerah. Ketiga komponen tersebut PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah menjadi jenis pajak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai hak secara utuh atas hasil pemungutan ketiga pajak tersebut.

Tabel 1
Realisasi PAD, PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah Tahun 2019-2023

TAHUN	PAD (Rp)	PBB (Rp)	BPHTB (Rp)	PAJAK AIR TANAH (Rp)
2019	2.416.861.743.886	459.405.559.173	930.121.680.828	5.365.904.198
2020	2.385.028.707.570	492.515.776.192	954.119.897.549	8.962.702.556
2021	2.544.154.213.946	540.202.704.283	909.086.157.353	13.343.953.586
2022	955.792.708.115	587.157.412.214	955.792.708.115	13.688.440.154
2023	1.106.719.059.181	586.630.303.514	1.106.719.059.181	10.475.755.212

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (2024)

Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan yang diperoleh selama 2019 sampai 2023 di Kabupaten Bekasi masih belum konsisten untuk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hendaknya pemerintah daerah lebih sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat untuk membayar pajak dan nantinya pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Handayani & Susanti, 2018).

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara detail meneliti pengaruh beberapa komponen Pajak Daerah yang terdiri dari PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah terhadap PAD yang dimana hal tersebut berbeda dari peneliti terdahulu. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah terhadap Efektivitas PAD Kabupaten Bekasi selama 5 tahun mulai dari 2019 sampai 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kebaruan pada penelitian ini adalah penambahan variable pajak air tanah dengan pengamatan yang dilakukan selama 5 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam upaya perbaikan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi.

2. Tinjauan Pustaka

Pengaruh Efektivitas PBB Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan karena nilai ekonomi dan kedudukan sosial yang lebih tinggi bagi individu atau entitas yang memiliki hak atas manfaat dari tanah atau bangunan tersebut. Peran PBB sangat penting dalam mendukung kelangsungan serta kelancaran pembangunan, sehingga perlu dikelola secara intensif seperti yang disampaikan oleh (Suparmono & Damayanti, 2010). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainiyah et al., 2020) dan (Saputri, 2020), kesimpulan

yang dapat diambil adalah adanya pengaruh dari pajak bumi dan bangunan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Marini, 2020) dengan judul “Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Daerah (Studi kasus pada BPKD Kota Sukabumi)” disimpulkan tidak ada dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H₁: Efektivitas PBB Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

Pengaruh Efektivitas BPHTB Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam UU Nomor 20 tahun 2000 menjelaskan bahwa BPHTB adalah biaya yang harus dibayar atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setiap kali seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah dan bangunan, mereka sebagai wajib pajak harus melakukan pembayaran BPHTB. Secara umum, BPHTB terjadi dikarenakan adanya proses transaksi jual beli tanah dan bangunan. (Mardiasmo, 2019) menyatakan bahwa hak atas kepemilikan tanah dan bangunan, atau hanya hak atas kepemilikan tanah saja, hal tersebut mencakup hak terhadap tanah itu sendiri, termasuk hak untuk mengelola tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh (Horman et al., 2023), (Iqbal & Juniar, 2020) dan (Hakim et al., 2020) dapat diambil kesimpulan bahwa BPHTB tidak signifikan terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Yani Rizal et al., 2019) dan (Miftha Rizkina, 2019) menyimpulkan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD.

H₂: Efektivitas BPHTB Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

Pengaruh Efektivitas Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah . terletak di bawah permukaan bumi, lokasinya dapat beragam dari daratan hingga di bawah dasar laut, tergantung pada distribusi dan karakteristik lapisan tanah atau batuan di suatu daerah. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat, permintaan akan air, terutama air bawah tanah, semakin meningkat. Maka untuk mengontrol penggunaan air tanah, hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 agar wajib pajak yang menggunakan air tanah diharuskan membayar pajak sesuai yang berlaku. Hal ini didukung oleh peneliti pendahulu (Lubis & Lusiana, 2019) dan (Kinasih, 2022) menyatakan bahwa pajak air tanah kurang efektif dalam memberikan pengaruh terhadap PAD. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Taufik et al., 2020) menyatakan bahwa pajak air tanah mengalami fluktuatif, pada tahun 2015-2016 PAT efektif terhadap PAD sedangkan pada tahun 2017-2018 hasil penelitian menyatakan tidak efektif. Sedangkan dalam penelitian (Horman et al., 2023) dan (Iqbal & Juniar, 2020) menyatakan bahwa pajak air tanah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

H₃: Efektivitas Pajak Air Tanah Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

H₄: Efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah Berpengaruh Terhadap Efektivitas PAD

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif

(Afgani et al., 2021). Metode deskriptif merupakan pengujian yang menggunakan data berupa angka-angka di dalamnya dan menganalisis menggunakan statistik (Rivanda et al., 2021); (Sugiyono, 2018). Objek penelitian mencakup Efektivitas PBB, Efektivitas BPHTB, Efektivitas Pajak Air Tanah, dan Efektivitas PAD. Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan teknik purposive sampling, yang diperoleh dari Sub. Bidang PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini akan memeriksa data dari tahun 2019 hingga 2023 selama lima tahun. Analisis data akan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Instrumen Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari tiga variabel independen yaitu Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (X_1), Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (X_2), dan Efektivitas Pajak Air Tanah (X_3), kemudian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel dependen .

Efektivitas PBB

Efektivitas adalah evaluasi terhadap sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Purbayati et al., 2022). Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan oleh organisasi, yang menunjukkan sejauh mana kontribusi output tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output terhadap sasaran yang ditetapkan, semakin efektif pula organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).

Menurut UU Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB adalah jenis pajak yang tergolong sebagai pajak kebendaan yang dikenakan atas objek bumi dan bangunan. Besar pajak yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan nilai objek pajak tanah dan bangunan itu sendiri, tanpa memperhatikan siapa yang membayar pajak tersebut.

Efektivitas BPHTB

Efektivitas adalah evaluasi terhadap sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pakpahan et al., 2022). Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan oleh organisasi, yang menunjukkan sejauh mana kontribusi output tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output terhadap sasaran yang ditetapkan, semakin efektif pula organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).

Peraturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disahkan dalam UU Nomor 21 tahun 1997, yang kemudian mengalami revisi menjadi UU Nomor 20 tahun 2000. Aturan tersebut menegaskan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Setiap kali seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah dan bangunan, baik sebagai individu maupun entitas, mereka diwajibkan membayar BPHTB. Secara sederhana, BPHTB terutama timbul saat terjadi transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan.

Efektivitas Pajak Air Tanah

Efektivitas adalah evaluasi terhadap sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan oleh organisasi, yang menunjukkan sejauh mana kontribusi output tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar kontribusi output terhadap sasaran yang ditetapkan, semakin efektif pula organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas dasar dari pengambilan air tanah yang telah digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk keperluannya.

Efektivitas PAD

Efektivitas adalah evaluasi terhadap sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan oleh organisasi, yang menunjukkan sejauh mana kontribusi output tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Rivanda et al., 2022). Dengan demikian, semakin besar kontribusi output terhadap sasaran yang ditetapkan, semakin efektif pula organisasi tersebut dalam menjalankan aktivitasnya (Mardiasmo, 2019).

Pendapatan asli daerah adalah total penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi lokal atau dari kekayaan yang terdapat di dalam wilayah daerahnya, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Sari & Halmawati, 2021).

Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menguraikan variabel dari studi yang akan dilakukan menjadi dimensi, indikator, dan skala yang dapat diukur (Rivanda et al., 2023). Dalam penelitian yang akan dilakukan, operasional variabel meliputi:

Tabel 2
Tabel Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Efektivitas PBB	$E. \text{ PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penerimaaan PBB - Target PBB 	Rasio

Efektivitas BPHTB	$E. \text{ BPHTB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan BPHTB}}{\text{Target BPHTB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penerimaan BPHTB - Target penerimaan BPHTB 	Rasio
Efektivitas Pajak Air Tanah	$E. \text{ PAT} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAT}}{\text{Target penerimaan PAT}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penerimaan PAT - Target PAT 	Rasio
Efektivitas PAD	$E. \text{ PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penerimaan PAD - Target PAD 	Rasio

4. Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov

		<i>Unstandardi</i>
		<i>ze</i>
		<i>Residual</i>
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	21.93607885
Deviation		
Most Extreme Difference	Absolute	.088
		.088
Positive		

Negative	-0.077
Kolmogorov-Smirnov Z	.678
Assymp. Sig. (2-tailed)	.747

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3 di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,747. Maka data dari setiap variabel berdistribusi normal karena nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan tabel diketahui nilai signifikansi sebesar 0,747 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

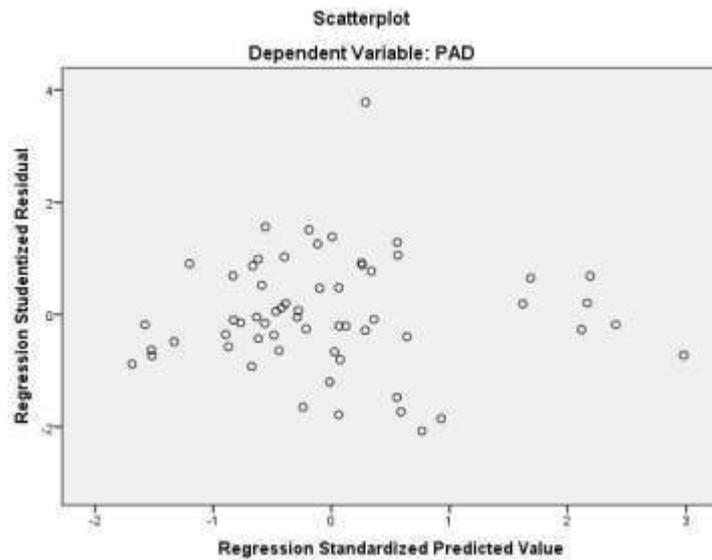
Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	43.082	7.536		5.717	.000		
PBB	.214	.021	.735	10.177	.000	.962	1.039
BPHTB	.335	.044	.555	7.674	.000	.959	1.043
PAJAK_AIR_TANAH	.030	.304	.007	.099	.922	.977	1.024

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 Uji Multikolinearitas di atas, diketahui bahwa ketiga variabel bebas memiliki nolai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas yang akan diteliti.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Gambar Uji Heterokedastisitas Scatterplot

Berdasarkan gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, ini artinya data yang diteliti terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.848 ^a	.719	.704	22.516	1.814

a. Predictors (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi durbin Watson di atas, diperoleh nilai DW 1,814. Karena nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU yaitu $1,689 < 1,814 < 2,311$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan melalui tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat nilai koefisien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients Beta*.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardize Coefficients		Standardize d Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	43.082	7.536	
PBB	.214	.021	.735
BPHTB	.335	.044	.555
PAJAK_AIR_ TANAH	.030	.304	.007

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas maka diperoleh persamaan :

$$\hat{Y} = 43,082 + 0,214 X_1 + 0,335 X_2 + 0,30 X_3 + e \quad (1)$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 43,082 menyatakan jika Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah bernilai nol dan tidak ada perubahan, maka Efektivitas PAD akan bernilai 43,082 satuan. Koefisien Efektivitas PBB (X_1) sebesar 0,214 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Efektivitas PAD (Y) akan naik sebesar 0,214 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien Efektivitas BPHTB (X_2) sebesar 0,335 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Efektivitas PAD (Y) akan naik sebesar 0,335 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien Efektivitas Pajak Air Tanah (X_3) sebesar 0,30 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Efektivitas PAD (Y) akan naik sebesar 0,30 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini memperlihatkan sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah dengan Efektivitas PAD. Dasar untuk menyatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai $R > 50\%$.

Tabel 7
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.848 ^a	.719	.704

a. Predictors (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh nilai R sebesar 0,848 atau 84,8%. Ini artinya variabel Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah memiliki hubungan yang erat dengan Efektivitas PAD. Nilai koefisien determinasi atau R-Square yang diperoleh sebesar 0.719 atau 71,9%. Angka ini menunjukkan bahwa nilai Efektivitas PAD yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 71,9% dijelaskan oleh variabel Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah, sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

Hasil Uji Hipotesis Statistik Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pada uji t di bawah ini, nilai t_{tabel} yang digunakan sebesar 2,003 yang diperoleh dari tabel t pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 (karena dua sisi jadi nilai signifikansinya 0,025) dan derajat bebas (df) = $n-k-1 = 60-3-1 = 56$. Pada tabel 8 terdapat nilai t_{hitung} yang dibandingkan dengan t_{tabel} .

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Model	Unstandardize Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	43.082	7.536		5.717	.000
PBB	.214	.021	.735	10.177	.000
BPHTB	.335	.044	.555	7.674	.000
PAJAK_AIR_ TANAH	.030	.304	.007	.099	.922

Sumber: data diolah, Output SPSS

Dari persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut:

- Hasil analisis uji t untuk Efektivitas PBB diperoleh t_{hitung} sebesar 10,177 > t_{tabel} sebesar 2,003 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi.
- Hasil analisis uji t untuk Efektivitas BPHTB diperoleh t_{hitung} sebesar 7,674 > t_{tabel} sebesar 2,003 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi.
- Hasil analisis uji t untuk Efektivitas Pajak Air Tanah diperoleh t_{hitung} sebesar 0,099 < t_{tabel} sebesar 2,003 dengan nilai signifikan sebesar $0,922 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Air Tanah tidak berpengaruh terhadap Efektivitas PAD di

Kabupaten Bekasi.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk melihat bagaimana variabel bebas yaitu Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Efektivitas PAD maka dapat dilakukan Uji F yaitu dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Tabel 9
Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1				47,740	.000 ^b
Regression	72608,032	3	24202,677		
Residual	28390,302	56	506,970		
Total	100998,333	59			

a. Dependent Variable : PAD

b. Predictors : (Constant), PAJAK_AIR_TANAH, PBB, BPHTB

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel Hasil Uji Signifikansi Simultan di atas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 47,740 dengan *p-value (sig)* 0,000. Dengan $\alpha=0,05$ $df_1=3$ dan $df_2=60-4-1=56$, maka $F_{tabel}=2,769$. Dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} $47,740 > 2,769$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka artinya secara simultan Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi.

PEMBAHASAN

Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan SPSS, penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas PBB dan BPHTB berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas PAD Kabupaten Bekasi tahun 2019-2023. Sedangkan untuk efektivitas pajak air tanah tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap efektivitas PAD Kabupaten Bekasi pada tahun 2019-2023.

Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ainiyah et al., 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas PBB berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas PAD, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan sehingga dapat melebihi target yang sudah ditetapkan. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari PBB hal tersebut juga dapat membuat pemerintahan dapat terus meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperluas basis ekonomi di daerahnya.

Selain PBB yang mengalami pengalihan pemungutan dari pajak pusat ke pajak daerah, pengalihan tersebut juga berlaku pada BPHTB yang dimana pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila sebagian besar BPHTB terpungut. BPHTB juga sering kali memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD suatu daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rizkiana, 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas BPHTB berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap efektivitas PAD.

Pajak air tanah juga menjadi salah satu komponen PAD yang dialihkan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Kurang efektifnya pajak air tanah juga dapat menggambarkan bahwa masih kurangnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Lubis & Lusiana, 2019) menyatakan bahwa efektivitas pajak air tanah kurang efektif terhadap PAD dikarenakan pemerintahan masih belum memaksimalkan pelayanan untuk pajak air tanah serta kurangnya koordinasi satu sama lain.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah Terhadap Efektivitas PAD Kabupaten Bekasi yang didukung dengan teori-teori, maka penelitian ini membentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.
2. Variabel Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.
3. Variabel Efektivitas Pajak Air Tanah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat diterima.
4. Hasil uji statistik menunjukkan secara simultan Efektivitas PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan sebesar 71,9% terhadap Efektivitas PAD di Kabupaten Bekasi, sedangkan sisanya sebesar 28,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

Daftar Pustaka

- Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1918–1932.
- Ainiyah, G. Z., Pratama, Y. A., & Pradikha, E. (2020). Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 1–12.
- Hakim, A., Arifiana, D., Rifa'i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 149–160. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112>
- Handayani, S. W., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1), 95–106.

- Horman, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1).
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 4(2), 53–70.
- Kinasih, E. R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb, Pbb-P2, Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2016 – 2020. Universitas Sriwijaya.
- Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019) Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2), 87–92.
- Manawan, V. A., Wahongan, A. S., & Palilingan, T. K. R. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Capaian Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum*, 11(3).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 1st ed., Vol. 20). Andi.
- Marini, D. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkd Kota Sukabumi). *Universitas Muhammadiyah Sukabumi*.
- Pakpahan, R., Purbayati, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Pemodelan Volatilitas Indeks Saham Infobank 15 Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1124–1138.
- Purbayati, R., Pakpahan, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Ketahanan Perbankan Syariah Indonesia Terhadap Fluktuasi Kondisi Makroekonomi Dan Kondisi Fundamental Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(2), 115–126.
- Putri, A. K., & Taun. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Reza, D., Ramadhani, D. K., Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Rivanda, A. K., Abirukmana, R. P., & Dwiastuti, S. S. (2023). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Textile Dan Garment Yang Terdaftar Di BEI. *Buana Ilmu*, 8(1), 34–55.
- Rivanda, A. K., Arif, I. A. I., & Ramadhan, R. (2022). Pengaruh BI Rate Dan Inflasi Terhadap Ihsng Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6 (2), 1828–1841.
- Rivanda, A. K., Muslim, A. I. (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 485–500.
- Rizkiana, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

- Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 80–94.
- Saputri, Y. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bekasi Tahun 2014-2018. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Satya, V. E., & Dewi, G. P. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 75–100.
- Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). Rajawali Pers.
- Siregar, S. A. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 194–204.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suparmono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Andi Offset.
- Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Gong Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251–259.